

GO.WEB.ID

KPU Sumut Gelar Rapat Pleno Pencabutan Nomor Urut Paslon Gubernur

A. Putra - [SUMUT.GO.WEB.ID](https://sumut.go.web.id)

Oct 1, 2024 - 10:09



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut menggelar rapat pleno terbuka pengundian dan pencabutan nomor urut pasangan calon Gubernur -Wakil Gubernur Sumut Senin (23/9/2024).

MEDAN - Bertempat di Hotel Grand Mercure Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut menggelar rapat pleno terbuka pengundian dan pencabutan nomor urut pasangan calon Gubernur -Wakil

Gubernur Sumut Senin (23/9/2024).

Rapat pleno terbuka pencabutan urutan dipimpin Ketua KPU Sumut didampingi anggota El Suhaimi Raja Ahab Damanik Fredianus Jhon Rahmat Zebua, Robby Hutagalung, Kotaris Banurea, Sekretaris KPU Sumut Sapran Daulay dan Kabag Hukum dan Teknis Maruli Pasaribu.

KPU Sumut juga mengundang Bawaslu Sumut, Forkopimda Sumut, dua pasangan calon Muhammad Bobby Afif Nasution -Surya dan Edy Rahmayadi - Hasan Basri Sagala, parpol, ormas, OKP, pengusung dan pendukung paslon, relawan dan undangan lainnya.

Ketua KPU Sumut Agus Arifin membacakan tata tertib pengundian dan pencabutan nomor urutan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut tahun 2024.

Usai pembacaan tata tertib rapat dilanjutkan dengan pencabutan nomor urutan berdasarkan saat pasangan calon mulai pertama mendaftar ke KPU Sumut yaitu pasangan calon Muhammad Bobby Nasution -Surya dengan mendapatkan nomor urutan 1.

Dilanjutkan pasangan calon Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala melakukan pencabutan nomor urutan dan mendapatkan nomor urutan 2.

Usai melakukan pencabutan nomor urutan Muhammad Bobby Afif Nasution-Surya mendapatkan kesempatan pertama menyampaikan sambutannya.

Pada sambutannya Bobby mengucapkan terima kasih pada KPU Sumut yang telah melaksanakan tahapan pencabutan nomor urutan. Bobby mengatakan apabila terpilih sebagai Gubernur akan memperbaiki jalan yang rusak di provinsi Sumut.

"Kalau kita ke Aceh dan Sumbar jalan jalannya mulus tak terasa sampai ketujuan," ujar Bobby.

Menurutnya dengan APBD Provinsi Sumut Rp.14 Triliun saat ini bisa memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak di Sumut.

Sementara itu Edy Ramayadi dalam sambutannya mengatakan pesta demokrasi adalah milik rakyat Sumut dan merekalah yang akan menentukannya.

Oleh karena itu pesta demokrasi ini tidak boleh ada tekanan maupun intervensi dari pihak manapun.

Terakhir Edy Rahmayadi berharap KPU dan Bawaslu bisa bersikap netral menjadi wasit yang adil, Begitu juga TNI, Polri dan ASN melakukan hal yang sama.